

JUAL-BELI OPINI AUDITOR

BUPATI Bogor Ade Munawaroh Yasin akhirnya mengikuti jejak sang kakak, Rachmat Yasin, yang terjerat kasus rasuah. Ade terjaring operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi pada Rabu, 27 April lalu. Ade beserta tiga anak buahnya diduga menyuap empat auditor Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Barat agar memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP) untuk laporan keuangan tahun anggaran 2021. Kasus ini berawal dari temuan audit proyek perbaikan jalan Kandang Roda-Pakansari yang masuk program Cibinong A City Beautiful.



Para tersangka yang juga ikut ditangkap bersama Bupati Bogor Ade Yasin sesuai menjalani pemeriksaan setelah terjaring dalam operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, 28 April 2022.

ADE MUNAWAROH YASIN (59 TAHUN)

Bupati Bogor 2018-2023

Jumlah kekayaan:

RP 4,1 MILIAR

(Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara per 31 Maret 2021)

Peran: Diduga memerintahkan anak buahnya memberikan suap agar mendapat opini "wajar tanpa pengecualian" dari Badan Pemeriksa Keuangan meski ada temuan dalam laporan keuangan Kabupaten Bogor

Karier:

- Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Jawa Barat 2015-2020
- Wakil Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bogor 2014-2019
- Ketua Dewan Pimpinan Cabang PPP Bogor 2010-2015
- Ketua Komisi I DPRD Bogor 2009-2014
- Advokat 2000-2009

Keluarga:

- Muhammad Yasin (ayah) - Salah satu pendiri PPP
- Rachmat Yasin (kakak) - Bupati Bogor 2008-2013 dan 2013-2014 (ditangkap KPK)



"Saya dipaksa bertanggung jawab terhadap perbuatan anak buah. Sebagai pemimpin, saya harus siap bertanggung jawab. Itu inisiatif mereka. Jadi ini namanya IMB: inisiatif membawa bencana."

Bupati Bogor **Ade Munawaroh Yasin**

Kepala Sub-Bidang Kas Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor

Peran: Diduga menyampaikan ke Bupati Ad bahwa laporan keuangan Kabupaten Bogor buruk sehingga berpotensi mendapat opini *disclaimer*/ tidak memberikan pendapat. Dia yang menyerahkan uang suap kepada auditor Badan Pemeriksa Keuangan

2. MAULANA ADAM

Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Bogor

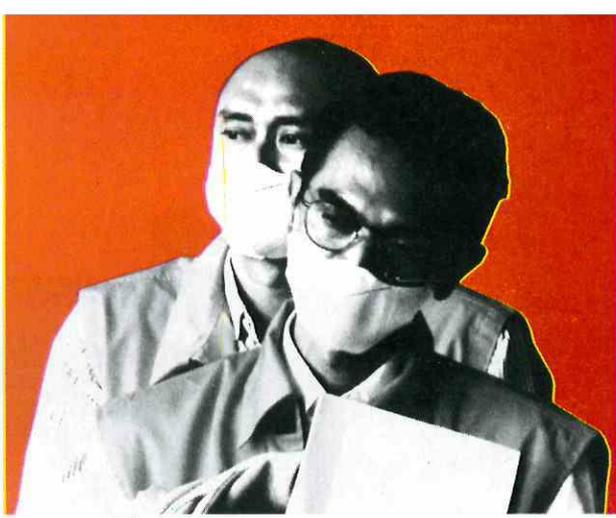
Peran: Diduga ikut menyerahkan uang suap kepada auditor BPK

PENERIMA

1. ANTHON MERDIANSYAH

Pegawai Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Jawa Barat/Kepala Sub-Auditorat Jawa Barat III/Pengendali Teknis

Peran: Diduga mengkondisikan susunan tim pemeriksa sesuai dengan permintaan pejabat Pemerintah Kabupaten Bogor dan menentukan obyek audit hanya untuk dinas tertentu



Tersangka Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Bogor Maulana Adam (depan) serta Kepala Sub-Bidang Kas Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor Ihsan Ayatullah.

3. RIZKI TAUFIK

Pejabat pembuat komitmen Dinas PUPR Kabupaten Bogor

Peran: Diduga mengumpulkan uang dari pengusaha untuk menyuap auditor BPK



“Kami menonaktifkan Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat, termasuk beberapa anggota staf yang menjadi tim pemeriksa dalam kasus ini.”

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
Isma Yatun

2. ARKO MULAWAN

Pegawai BPK Perwakilan Jawa Barat/Ketua Tim Audit Interim Kabupaten Bogor

Peran: Diduga memeriksa dinas tertentu supaya tidak mempengaruhi hasil opini yang diinginkan

3. HENDRA NUR RAHMATULLAH KARWITA

Pegawai BPK Perwakilan Jawa Barat/Pemeriksa

Peran: Diduga memeriksa dinas tertentu supaya tidak mempengaruhi hasil opini yang diinginkan

4. GERRI GINANJAR TRIE RAHMATULLAH

Pegawai BPK Perwakilan Jawa Barat/Pemeriksa

Peran: Diduga memeriksa dinas tertentu supaya tidak mempengaruhi hasil opini yang diinginkan

NASKAH: LINDA TRIANITA, **SUMBER:** RILIS KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI, RISET, **FOTO:** TEMPO/IMAM SUKAMTO (TERSANGKA, ISMA), ANTARA/INDRIANTO EKO SUWARSO (IHSAN-MAULANA), BOGORKAB.GO.ID (ADE)



MEMOLES HASIL PEMERIKSAAN

Perkara suap dengan modus mendapatkan opini "wajar tanpa pengecualian" (WTP) dari BPK dalam laporan keuangan sudah beberapa kali terjadi. Para kepala daerah berlomba memperoleh status WTP di antaranya untuk mendapatkan dana insentif daerah dari pemerintah pusat. Opini WTP juga bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat atas kepemimpinan kepala daerah. Berikut ini perkara jual-beli opini BPK yang pernah terungkap.

1 Kementerian Desa dan Pembangunan dan Daerah Tertinggal (2017)

Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap Inspektur Jenderal Kementerian Desa Sugito dan Kepala Bagian Tata Usaha Kementerian Desa Jarot Budi Prabowo pada Mei 2017. Mereka menyuap Auditor Utama Keuangan Negara III BPK Ali Sadli dan Kepala Sub-Auditorat III Auditorat Keuangan Negara Rachmadi Saptogiri sebesar Rp 440 juta untuk pemberian opini WTP. KPK juga menemukan uang sebesar US\$ 3.000 dan Rp 1,145 miliar di ruangan eselon I BPK.

2 Pemerintah Kabupaten Bekasi

Kejaksaan menangkap dua auditor Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Jawa Barat, AMR dan F, dengan barang bukti uang Rp 350 juta pada Kamis, 31 Maret lalu. Dua auditor itu memeras rumah sakit dan 17 pusat kesehatan masyarakat di Bekasi dengan dalih mempengaruhi hasil pemeriksaan.

3 PT Jasa Marga (Persero)

Auditor madya BPK Sigit Yugoharto terbukti menerima suap berupa sepeda motor Harley-Davidson seharga Rp 115 juta serta fasilitas hiburan malam. Dengan imbalan itu, Sigit diminta mengubah temuannya dalam pemeriksaan dengan tujuan tertentu terhadap PT Jasa Marga. Ia mengubah temuan keuangan Jasa Marga yang sebelumnya sekitar Rp 13 miliar menjadi Rp 842,9 juta, dengan rincian perubahan temuan keuangan pada 2015-2016.

4 Pemerintah Kota Bekasi

KPK menangkap Kepala Sub-Auditorat BPK Jawa Barat III Suharto dan Kepala Seksi BPK Wilayah Jawa Barat III B Enang Hermawan pada Juni 2010. Suharto dan Enang terbukti menerima suap Rp 400 juta dari pejabat Pemerintah Kota Bekasi agar memberikan opini WTP terhadap laporan keuangan Pemerintah Kota Bekasi tahun anggaran 2009.

5 Pemerintah Kota Tomohon

KPK menetapkan dua auditor BPK Perwakilan Sulawesi Utara, Bahar dan Munzir, sebagai tersangka penerima suap dari Wali Kota Tomohon Jefferson Soleiman Montesquieu Rumajar sebesar Rp 600 juta. Pemberian tersebut dilakukan untuk mengubah opini dari tidak memberikan pendapat (*disclaimer*) menjadi wajar dengan pengecualian terhadap laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2007.